

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dimas Bagus Mahasinul Akbar¹, Indri Arrafi Juliannisa²
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
Dimasbagus.ma@upnvj.ac.id¹, indri.arrafi@upnvj.ac.id²

*Correspondence: Dimasbagus.ma@upnvj.ac.id

INFO ARTIKEL

Diajukan :10-12-2022
Diterima :20-12-2022
Diterbitkan :26-12-2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Investasi dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat penerimaan pajak daerah tertinggi di Pulau Kalimantan, tercatat pada tahun 2016 - 2020 Kalimantan Timur memiliki penerimaan pajak tertinggi di Pulau Kalimantan. Penelitian ini menggunakan data panel dengan menggabungkan data time series dan cross section. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan investasi berpengaruh positif signifikan, sedangkan PDRB dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pajak daerah. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa PDRB, jumlah penduduk, investasi dan belanja modal berpengaruh terhadap pajak daerah.

Kata kunci: Pajak Daerah; Produk Domestik Regional Bruto; Jumlah Penduduk, Investasi; Belanja Modal.

Keywords: Local Tax; Gross Regional Domestic Product; Population; Investment; Capital Expenditure.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Gross Regional Domestic Product (GDP), Total Population, Investment and Capital Expenditure on Regional Tax Revenue in Regencies/Cities in East Kalimantan Province. East Kalimantan Province is one of the provinces that has the highest level of regional tax revenue on the island of Kalimantan, recorded in 2016 - 2020 East Kalimantan has the highest tax revenue on the island of Borneo. This study uses panel data by combining time series and cross section data. The method in this study uses panel data regression analysis which can be used to measure the effect of the independent variable on the dependent variable. The results of this study indicate that population and investment have a significant positive effect, while GRDP and capital expenditures have no effect on local taxes. The results of the study simultaneously show that GRDP, population, investment and capital expenditures have an effect on local taxes.



Attribution-ShareAlike 4.0 International

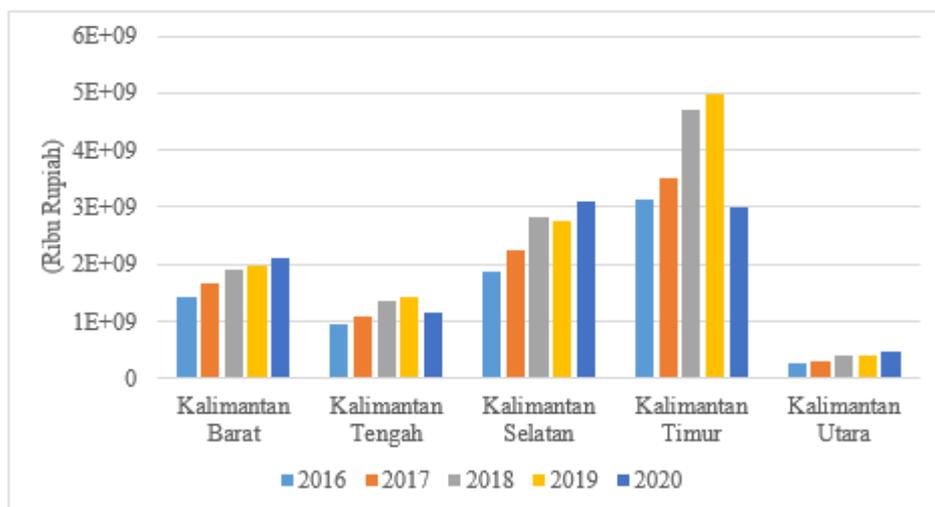
Pendahuluan

Pajak merupakan instrument yang paling efektif dalam kebijakan fiskal yang dapat mendorong kontribusi rakyat terhadap Negara, pajak dapat mendorong berbagai aspek, dari aspek ekonomi pajak dapat menggerakkan ekonomi yang berperan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat ([Lativa, 2021](#)). Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi pengaturan, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. fungsi retribusi pendapatan ([Rukmini, 2017](#)).

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terletak di Kabupaten Panajem Paser Utara dan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara tersebut akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah setempat. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) juga akan berdampak pada tingginya arus migrasi penduduk. Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur terbilang rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki jumlah penduduk tertinggi pada Pulau Kalimantan ([Aguswin & Akromusyuhada, 2020](#)). Peningkatan migrasi penduduk yang di akibatkan oleh pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah sebagaimana dengan teori yang di kemukakan oleh ([Lumy et al., 2021](#)) yakni tinggi rendahnya penerimaan di sektor pajak bergantung pada banyaknya penduduk. Perlu diketahui juga bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki penerimaan pajak tertinggi di Pulau Kalimantan pada kurun waktu 2016 sampai 2020 ([Wibowo, 2022](#)). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, yang mana jika PDRB meningkat akan mempengaruhi potensi kenaikan penerimaan daerah ([Prana, 2019](#)). Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, yang mana dapat digambarkan melalui penyediaan prasarana dan sarana publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak akan semakin tinggi.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki penerimaan pajak tertinggi di Pulau Kalimantan.

Grafik 1. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Pulau Kalimantan 2016-2020



Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2020

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi di Pulau Kalimantan yang dengan cara pada umumnya mempunyai tingkatan pendapatan pajak daerah paling tinggi ([Zaini, 2019](#)). Sumber pendapatan pajak paling tinggi pada tahun 2019 paling utama Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan keseluruhan menggapai Rp. 301,78 M. tercantum anggaran kesertaan interest sebesar Rp. 208 M. Kenaikan pendapatan pajak tidak luput dari perkembangan ekonomi nasional serta wilayah yang bertumbuh lumayan baik, maka perihal itu bisa pengaruhi perkembangan pajak yang baik sebab daya beli masyarakat bertambah (Arham, 2020).

Penerimaan pajak tidak lepas dari tinggi rendahnya pendapatan dalam suatu wilayah, dimana pedapatan perkapita menjadi tolak ukur tinggi rendahnya penerimaan pajak (Fauzan, 2022). Jika dilihat dari grafik 2 bahwa penerimaan pajak daerah di Provinsi Kalimantan Timur per Kabupaten/Kota terus mengalami fluktuasi pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 Kota Balikpapan yang memiliki kontribusi terbesar dalam pajak mampu melampaui target APBD. Capaian sepanjang 2019 Rp.631 M melebihi target Rp.501 M. Kota Balikpapan mampu memberikan kontribusi pajak restoran yang di targetkan Rp. 89 M sudah mencapai Rp.102 M, pajak hotel ditargetkan Rp.41 M, sudah mencapai Rp.45 M, pajak hiburan Rp. 24 M sudah mencapai Rp.25 M, selanjutnya pajak penerangan jalan dengan target Rp.119 M sudah mencapai Rp.122 M, pajak reklame target Rp.9 M sudah mencapai Rp.9,6 M dan pajak sarang burung walis dengan target Rp.50 juta mencapai Rp.57 juta. Realisasi penerimaan pajak dapat terus meningkat dikarenakan adanya isu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Pada tahun 2020 total penerimaan pajak daerah mencapai Rp.2,46 T atau 64,36 persen dari target sebesar Rp.1,97 T atau 80,30% dari keseluruhan realisasi pajak daerah berdasarkan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi, secara persentase realisasi capaian tertinggi terdapat di Kota Samarinda sebesar 120,56 persen. Apabila sumber pajak daerah tidak mempertimbangkan penerimaan dari Pemprov Kalimantan Timur, lalu daerah dengan kontribusi pajak daerah terbesar dari Kota Balikpapan (Kemenkeu, 2020). Sumber pajak daerah terbesar di kota Balikpapan pada periode tahun 2020 yakni pajak penerangan jalan sebesar Rp.121,4 M, kemudian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp.99,77 M, BPHTB sebesar Rp.77,50 M, pajak parkir sebesar 12,69 M dan penerimaan pajak yang lain.

PDRB di masing-masing Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren positif pada tahun 2016-2019, namun laju peningkatan PDRB dapat dikatakan cukup lambat hanya kurang dari 5%, dan besaran jumlah PDRB masing-masing wilayah juga berbeda. Pada tahun 2020 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan adanya wabah pandemi Covid 19 yang mengakibatkan lemahnya di beberapa sektor perekonomian. Peningkatan dan penurunan PDRB di 10 Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh berbagai faktor perekonomian dan karakteristik pada masing-masing daerah. pajak daerah di beberapa kabupaten kota cenderung menurun namun PDRB di Kabupaten atau Kota tersebut meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sebagian aktivitas ekonomi di daerah pembentuk PDRB disetorkan oleh wajib pajak yang terdaftar diluar provinsi lain. Selanjutnya, kerugian yang dialami oleh para pengusaha pada kurun waktu 2 tahun sebelumnya saat terjadi kontraksi ekonomi dikompensasi dengan kewajiban perpajakan tahun berjalan turun menekan jumlah penyetor pajak (Kemenkeu, 2018). Berbagai hal telah terjadi pada Kota Bontang dimana Produk Domestik Regional Bruto kota tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018, namun penerimaan pajak daerah di Kota Bontang justru mengalami peningkatan.

Sebaran penduduk tercatat pada tahun 2020 Kalimantan Timur terkonsentrasi di Kota Samarinda dengan jumlah penduduk 827.994 jiwa atau 21,99 persen penduduk Kalimantan Timur. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah penduduk 729.380 jiwa, yaitu sebesar 19,37 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kota Balikpapan dengan total jumlah penduduk sebesar 688.318 jiwa atau 18,26 persen, sebaran penduduk selanjutnya pada tahun 2020 yakni Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah penduduk 434.459 atau 11,54 persen, selanjutnya pada Kabupaten Paser dengan jumlah penduduk 275.452 jiwa atau 7,31 persen, diikuti oleh Kabupaten Berau dengan jumlah penduduk 248.035 jiwa atau 6,59 persen, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan jumlah penduduk 4,74 persen, selanjutnya pada Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah penduduk 172.288 jiwa dan yang paling rendah

pada Kabupaten Mahakam Ulu dengan jumlah penduduk 32.513 jiwa atau 0,86 persen. Kabupaten/Kota yang memiliki penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda sebesar 827.768 jiwa yang tercatat pada tahun 2020 dan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu dikarenakan Mahakam Ulu merupakan Kabupaten yang paling akhir terbentuk (BPS,2020). Jumlah masyarakat yang terus mengalami peningkatan, banyaknya penduduk tidak selalu menambahkan pendapatan pajak daerah. Adanya penduduk yang tidak produktif karena sulit mencari lapangan pekerjaan, sehingga banyak penduduk yang tidak mampu bayar pungutan pemerintah ([Hakib, A., & Arifin, n.d.](#))

Tingginya tingkat penyerapan pada tahun 2019 dan 2018 bersumber dari belanja pegawai yang total 62,50%, kemudian belanja bantuan keuangan total 53,02% dan belanja bunga total 50,75%, sedangkan penerapan belanja modal mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Tercatat pada periode pelaporan, kinerja realisasi belanja tertinggi pada Kabupaten Kutai Timur dengan total 68,94%. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu dengan daerah penyerapan belanja yang terendah dengan total 32,87%. Total tersebut sedikit menurun dibandingkan pada tahun 2019 dan 2018 yang mencapai 35,20% dan 41,23% (Kemenkeu, 2020).

Belanja modal di beberapa Kabupaten atau Kota Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan seperti halnya di Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, Balikpapan dan Bontang. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan besaran APBD akibat pengurangan Dana Transfer ke Daerah, dan juga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memprioritaskan belanja pegawai dan belanja barang, dan lebih memilih untuk mengurangi belanja modal (Kemenkeu, 2017). Terdapat gap pada tahun 2017 berdasarkan data pajak daerah pada Kabupaten atau kota tersebut mengalami kenaikan dan seharusnya berdampak pada kenaikan belanja modal, mengingat bahwa sumber pengeluaran pemerintah dalam hal belanja modal yakni bersumber dari pajak. Pada tahun 2020 juga belanja modal di beberapa Kabupaten atau Kota cenderung mengalami penurunan seperti halnya di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Penurunan tersebut dikarenakan turunya APBD pemerintah daerah dan juga disebabkan karena pada pembangunan infrastruktur terhambat akibat dari pembatasan sosial di masa pandemi Covid 19 ([Kemenkeu,2020](#)). Maka dari itu, mengharuskan pemerintah untuk lebih mengalokasikan dana bagi belanja-belanja yang dapat memberikan efek terhadap penerimaan pajak atau yang lebih besar dan harus fokus pada pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur ([Kemenkeu, 2018](#))

Teori Pajak Musgrave

Pajak ialah tarif hak istimewa yang dilakukan pemerintah sesuai hukum pemungutannya bisa dipaksakan pada wajib pajak tanpa terdapat balas jasa secara langsung penggunaannya serta ditujukan dalam pengelolaan penguasa wilayah serta pembangunan wilayah (Mangkoesoebroto, 1991). Secara umum, tujuan pajak adalah untuk mencapai keadaan kondisi ekonomi yang berkembang di suatu negara, sehingga membatasi konsumsi, mengalihkan sumber daya dari konsumsi, mendorong tabungan dan investasi, dan mentransfer sumber daya dari rakyat ke pemerintah, sehingga memungkinkan pemerintah berinvestasi mengubah pola investasi, mengurangi ketimpangan ekonomi dan memobilisasi surplus ekonomi. Dengan begitu Teori Pajak Musgrave mengatakan jika dengan jumlah penduduk, pendapatan perkapita serta peraturan pemerintah baik pusat ataupun daerah hendak berakibat yang besar kepada pajak.

Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas- batas daerah yang mempunyai hak menata serta mengurus kebutuhan delegasi penguasa serta warga setempat bagi kemauan orang serta atas prakarsa sendiri dalam sistem republik kesatuan di Indonesia. Pajak daerah merupakan iuran wajib pada daerah oleh orang individu ataupun lembaga, wajib bagi hukum, tanpa balasan langsung, serta dipakai guna penuhi keinginan wilayah untuk menggapai kenyamanan yang sebesar- besarnya untuk warga ([Mardiasmo, 2011](#)).

Definisi Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. PDRB dapat melihat kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah tertentu. Adanya keterbatasan dalam menyediakan faktor-faktor tersebut, menyebabkan besaran PDRB berbeda-beda di setiap daerah. Dalam perekonomian suatu negara, setiap sektor saling bergantung satu sama lain, saling membutuhkan tenaga kerja, bahan baku, dan hasil akhir. Sektor industri membutuhkan bahan baku dari sektor pertanian dan pertambangan, dan sektor pertanian dan jasa membutuhkan hasil dari sektor industri.

Teori Jumlah Penduk

(Lucas, dkk 1995) mengemukakan penduduk ialah hasil dari tingkatan kelahiran, tingkatan migrasi serta tingkatan kematian. (Maulina, 2017) Mengemukakan bahwa penduduk ialah jumlah orang yang bermukim di wilayah geografis Negeri Indonesia kurang lebih 6 bulan yang mempunyai tujuan menetap baik produktif ataupun tidak produktif.

Teori Investasi

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran guna pembelian barang modal serta peralatan produksi dengan tujuan guna mengubah, serta paling utama menaikkan barang modal dalam perekonomian yang hendak dipakai guna memproduksi benda serta pelayanan di era depan. Dengan kata lain, investasi merujuk pada aktivitas pengeluaran yang dilakukan guna menaikkan kapasitas produktif suatu perekonomian (Sukirno,2009).

Definisi Belanja Modal

Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) menafsirkan belanja modal merupakan pengeluaran ataupun pembiayaan yang ditujukan dalam membuat modal dengan cara mengadakan, membeli, ataupun mendirikan asset yang memiliki angka lebih dari satu tahun kurun waktu akuntansi. Contoh beberapa dari belanja modal adalah pembelian tanah, mesin pabrik, membangun gedung, bangunan, irigasi, jalan dan juga pembelian asset tetap lainnya.

Belanja modal berpengaruh terhadap PAD. Hal tersebut dikarenakan dapat mempengaruhi masyarakat untuk membayar berbagai pungutan seperti retribusi dan pajak dengan cara pemerintah daerah dapat memaksimalkan belanja modal dalam membangun wilayahnya. Berbelanja modal yang efisien serta efektif, sehingga pembangunan sarana semacam toilet umum, jalan raya, taman hiburan dan lain- lain bisa dirasakan oleh publik. Hal tersebut membuat masyarakat merasa puas akan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan perubahan yang terjadi pada daerahnya mereka. Dengan seperti itu mereka hendak bersedia membayar pungutan atau pajak sebagai rasa tanggung jawab mereka kepada pemerintah daerah. Tentu saja hal tersebut dapat meningkatkan PAD.

Penelitian Terdahulu

([Asmawanti et al.](#), 2016) menyatakan apabila PDRB mengalami kenaikan menyebabkan kemampuan dalam membayar pajak dapat meningkat. Ditinjau dari situasi perekonomian yang berkembang serta bertumbuh akan menaikkan penghasilan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan tingginya nilai PDRB yang terdapat di suatu wilayah dapat meningkatkan tingginya rotasi perekonomian di wilayah tersebut yang akan berdampak pada penerimaan pajak yang di peroleh pemerintah daerah. Namun tingginya PDRB juga tidak seiring dengan tingginya tingkat kesadaran atau kepatuhan terhadap pentingnya arti dalam membayar pajak,

([Lumy et al.](#), 2021) menerangkan adanya hubungan positif antar jumlah penduduk dengan pajak daerah artinya jika jumlah penduduk meningkat ataupun mengalami peningkatan dapat menaikkan pendapatan pajak daerah dapat bertambah juga maupun sebaliknya. Penduduk tidak selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Jika tingkatan kemajuan masyarakat besar menghasilkan serta meresap hasil produksi dan output yang baik

(Desideria et al., 2019) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif investasi terhadap PAD, hal tersebut dapat dijelaskan adanya penanaman Investasi maka akan terbuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Adanya investasi juga berakibat kepada pelaksanaan proyek pembangunan, dan usaha – usaha di berbagai sektor. Dengan berjalanya berbagai aktifitas ekonomi dan dapat berakibat pada kenaikan penghasilan masyarakat, dan dapat warga membayar pajak serta retribusi. Pembayaran pajak dan retribusi berdampak terhadap peningkatan PAD.

Menurut (Nurmuthmainnah, 2020) menerangkan pajak yang terus menjadi meningkat diharapkan dapat bertambah alokasi belanja modal pemerintah daerah alhasil berakibat pada mutu layanan publik yang terus menjadi baik. Dengan alokasikanya berbelanja modal dari zona layanan public diharapkan pendapatan pajak yang di dapat hendak meningkat bersamaan dengan kenaikan layanan publik. Tetapi sering kali terdapatnya kenaikan peruntukan berbelanja modal tidak searah dengan pendapatan pajak daerah yang diharapkan

Metode Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan data pajak daerah, PDRB, jumlah penduduk, investasi dan belanja modal. Sampel pada peneltiain ini menggunakan non probability sampling melalui teknik sampling jenuh. Dimana, peroleha sampelnya yang dikumpulkan yakni data keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terbagi menjadi 3 kota yakni Balikpapan, Samarinda dan Bontang dan 7 Kabupaten yakni Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Paser dan Penajam Paser Utara pada tahun 2016-2020, sehingga jumlah sampel keseluruhan datanya menjadi 50 data. Pada penelitina ini data yang dipakai berjenis data sekunder yang merupakan data tidak langsung dikumpulkan melalui berbagai sumebr literature yang sudah dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi dari instansi pemerintah/swasta, buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang terkait. Pengumpulan daa yang digunakan adalah dengan melakukan studi pustaka yang kemudian digunakan sebagai dasar penelitian. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yaitu kombinas antara data time series dan cross section, data time seriues yang dipergunakan adalah selama 5 tahun terakhir yang terhitung dari tahun 2016-2020, sedangkan data cross section yang dipegunakan adalah 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan penjelasan ini, terjadi persamaan regresi yang di jabarkan pada penelitian ini sebagai berikut :

$$PD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 INV_{it} + \beta_4 BM_{it} + \varepsilon$$

Dimana:

PD	= Pajak Daerah
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto
JP	= Jumlah Penduduk
INV	= Investasi
BM	= Belanja Modal
i	= <i>Cross Section</i>
t	= <i>Time Series</i>
ε	= <i>error term</i>

Hasil Dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini dilakukan dalam mendeteksi terdistribusi dengan normal atau tidaknya data yang digunakan dengan melihat nilai probabilitasnya. Untuk hipotesis dan kriterianya yaitu:

H_0 : data terdistribusi dengan normal

H_1 : data tidak terdistribusi dengan normal

Jika nilai probabilitas Jarque-Bera di bawah 0,05 artinya data tidak terdistribusi dengan normal atau dengan ini hipotesis nol ditolak

Tabel 1. Uji Normalitas

<i>Jarque-Bera</i>	1.714648
<i>Probabality</i>	0.424296
Sumber: <i>Output Eviews</i>	

Sesuai hasil di atas, nilai probabilitas Jarque-Bera $1.714648 > 0,05$ artinya data penelitian ini telah terdistribusi dengan normal atau dengan ini hipotesis nol diterima.

Uji Multikolinearitas

Uji ini untuk mendeteksi adanya korelasi antarvariabel independen. Apabila korelasi antarvariabel independen di atas 0,80 dikatakan terdapat gejala multikolinieritas.

Tabel 2. Uji Multiolinieritas

	PDRB	JP	INV	BM
PDRB	1	0.715244	0.474513	0.486665
JP	0.715244	1	0.167303	0.548052
INV	0.474513	0.167303	1	0.189999
BM	0.486665	0.548052	0.189999	1

Sumber: *Output Eviews*

Uji multikolinieritas di atas menunjukkan hasil korelasi antarvariabel independent kurang dari 0,80, berarti data yang digunakan terbebas dari masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji Glejser digunakan pada penelitian ini, dimana dikatakan terbebas dari masalah heterokedastisitas apabila probabilitas tiap variabel $> 0,05$.

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas

<i>Dependent Variable: ABSRESAB</i>	
<i>Method: Panel Least Squares</i>	
<i>Variable</i>	<i>Prob</i>
PDRB	0.8982
JP	0.7490
INV	0.0509
BM	0.2275
Sumber: <i>Output Eviews</i>	

Sesuai hasil di atas diketahui bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat heterokedastisitas dikarenakan probabilitas semua variabel independennya lebih besar dari 0,05.

Uji Autokorelasi

Uji ini berguna dalam mendeteksi adanya korelasi antara residual pada periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Uji Durbin Watson (D-W) digunakan pada uji ini. Ketentuannya yaitu:

- Nilai D-W terletak di bawah -2 menandakan adanya autokorelasi positif
- Nilai D-W terletak antara -2 sampai + 2 menandakan tidak adanya autokorelasi

- c) Nilai D-W terletak diatas +2 menandakan adanya autokorelasi negatif

Tabel 4. Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson stat</i>	1.193470
---------------------------	----------

Sumber: *Output Eviews*

Dari hasil di atas, didapatkan nilai *Durbin-Watson stat* sebesar 0.993556 dalam hal ini nilai berada dikisaran angka -2 sampai dengan 2 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi **Teknik Penentuan Model**

Hausmant Test

Uji ini digunakan dalam memilih model fixed effect atau random effect dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Model *Random Effect*

H₁: Model *Fixed Effect*

Tolak H₀ jika nilai probabilitas *Chi-square* < α (0,05), berarti model terbaik yang terpilih adalah *fixed effect*

Tabel 5. Hausman Test

<i>Cross-section random</i>	0.1076
-----------------------------	--------

Sumber: *Output Eviews*

Sesuai hasil di atas diketahui bahwa model terbaik untuk meregresikan data panel ialah model *random effect* karena probabilitas *Chi-square* 0,1076 > α (0,05).

Uji Hipotesis

Uji T

Uji T menggambarkan besarnya variabel independen secara individual dapat memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Tolak H₀ jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, berarti variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Uji T

<i>Dependent Variable: TPT</i>		
<i>Method: Panel Least Squares</i>		
<i>Variable</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob</i>
C	-4.262931	0.0001
PDRB	-1.078820	0.2880
JP	6.246531	0.0000
INV	2.616193	0.0130
BM	1.084793	0.2854

Sumber: *Output Eviews*

Merujuk pada Tabel *Random Effect* pada penelitian ini, nilai $df = n - k$ sehingga $df = 50 - 4 = 46$ dengan signifikansi 0,05 sehingga nilai t_{tabel} sebesar 1.67866, maka

1. PDRB memiliki t_{hitung} ($1.078820 < t_{tabel}$ (1.67866) sementara itu nilai probabilitas $0.2880 > 0,05$ menandakan secara statistik H₀ diterima sehingga diartikan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah, atau dengan kata lain H₁ penelitian ini di tolak.

2. Jumlah penduduk memiliki $t_{hitung} (6.246531) > t_{tabel} (1.67866)$ sementara itu nilai probabilitas $0.0000 < 0,05$ menandakan secara statistik H_0 ditolak sehingga diartikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap pajak daerah, atau dengan kata lain H_1 penelitian ini diterima.
3. Investasi memiliki $t_{hitung} (2.616193) > t_{tabel} (1.67866)$ sementara itu nilai probabilitas $0.0130 < 0,05$ menandakan secara statistik H_0 ditolak sehingga diartikan bahwa Investasi berpengaruh terhadap pajak daerah, atau dengan kata lain H_1 penelitian ini diterima.
4. Belanja modal memiliki $t_{hitung} (1.084793) < t_{tabel} (1.67866)$ sementara itu nilai probabilitas $0.2854 > 0,05$ menandakan secara statistik H_0 di terima sehingga diartikan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pajak daerah, atau dengan kata lain H_1 penelitian ini di tolak.

Uji F

Uji F mengukur besarnya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $F_{\alpha(k-1, n-k)}$ maka H_0 ditolak, berarti seluruh variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Uji F

<i>F-statistic</i>	11.53709
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000004

Sumber: *Output Eviews*

Nilai F_{tabel} ($df_1=4, df_2=46$) diperoleh sebesar 2.58 maka nilai $F_{hitung} (11.53709) > F_{tabel} (2.58)$ sehingga disimpulkan bahwa PDRB, jumlah penduduk, investasi dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

R-Squared dan Adjusted R-Squared

Nilai *R-squared* mengukur besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen, sedangkan nilai *Adjusted Rsquared* berguna dalam mengevaluasi model regresi yang terbaik. Nilai *R-squared* dan *Adjusted R-squared* diperoleh sebagai berikut:

Tabel 8. R-squared dan Adjusted R-squared

<i>R-Squared</i>	0.568691
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.519399

Sumber: *Output Eviews*

Berdasarkan hasil olah data, diketahui nilai *R-squared* sebesar 0.568691 berarti variabel dependen (Pajak Daerah) dapat dijelaskan variabel independen (PDRB, jumlah penduduk, investasi dan belanja modal) sebesar 56,87%, sedangkan sisanya 43,13%% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.519399 berarti variabel dependen (Pajak Daerah) dapat dijelaskan variabel independen (PDRB, jumlah penduduk, investasi dan belanja modal) sebesar 51,93%%, sedangkan sisanya 49,06% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

Hasil regresi data panel PDRB memiliki $t_{hitung} (1.078820 < t_{tabel} (1.67866)$ sementara itu nilai probabilitas $0.2880 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah. Dengan kata lain hipotesis pertama dalam penelitian ini di tolak. Hal ini berarti peningkatan PDRB tidak begitu memberikan dampak terhadap peningkatan pajak disebabkan karena adanya distribusi pendapatan yang tidak merata di setiap Kabupaten/Kota

yang berakibat terhadap ketidakmampuan masyarakat dalam membayar berbagai pungutan berupa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nalendra (2013) menyatakan apabila PDRB mengalami kenaikan menyebabkan kemampuan dalam membayar pajak juga meningkat. Bisa ditinjau dari situasi perekonomian yang berkembang serta bertumbuh akan menaikkan penghasilan masyarakat di wilayah itu. Kalau dengan besarnya nilai PDRB yang terdapat dalam sesuatu wilayah dapat meningkatkan tingginya rotasi perekonomian di wilayah itu serta juga berakibat kepada pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah daerah. Namun terkadang tingginya PDRB yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut tidak seiring dengan tingginya tingkat kesadaran atau kepatuhan terhadap pentingnya arti dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini tidak serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Anatoly Aditya Saputra (2018) yang menyatakan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Lumy et al., 2021) yang juga menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

Hasil regresi data panel Jumlah penduduk memiliki $t_{hitung} (6.246531) > t_{tabel} (1.67866)$ sementara itu nilai probabilitas $0.0000 < 0,05$ menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Atas hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini di terima. Hal ini searah dengan teori yang dikemukakan oleh Musgrave yang menerangkan kalau besar kecilnya pendapatan disektor pajak sangat ditentukan oleh jumlah masyarakat, maka dikatakan jika jumlah masyarakat mempengaruhi kepada pendapatan pajak daerah. Pada saat jumlah masyarakat bertambah, sehingga permintaan akan barang public akan semakin banyak maka pemerintah akan tetap memaksimalkan untuk memberikan barang- barang publik itu namun dengan jasa timbal balik dari warga yang berbentuk pemungutan pajak yang bersifat memaksa.

Teori Hansen menyinggung hal stagnasi sekuler yang beranggapan kalau bila jumlah penduduk terus menjadi banyak ataupun bertambah hendak bertambah pula permintaan agregatif paling utama pada investasi. Terjadinya pertumbuhan serta perkembangan penduduk yang sangat cepat tidaklah hendak jadi penghambat untuk pembangunan ekonomi, sebab masyarakat memiliki kapasitas yang besar guna menciptakan serta meresap hasil produksi yang telah dihasilkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lumy et al., 2021) menerangkan terdapatnya hubungan positif antar jumlah penduduk dengan pajak daerah artinya, jika jumlah penduduk meningkat ataupun hadapi peningkatan hendak menaikkan pendapatan pajak daerah bertambah pula begitu kebalikannya. Penduduk tidak selalu jadi penghambat pembangunan ekonomi sesuatu wilayah. Bila tingkatan kemajuan masyarakat besar sehingga guna menghasilkan serta meresap hasil produksi yang dihasilkan hendak besar pula. Berarti tingkatan perkembangan penduduk yang besar hendak diiringi dengan tingkatan penghasilan yang besar. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anatoly Aditya Saputra (2018) yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan tingkat pertumbuhan penduduk akan disertai dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah.

Pengaruh Investasi Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

Hasil regresi data panel Investasi memiliki $t_{hitung} (2.616193) > t_{tabel} (1.67866)$ sementara itu nilai probabilitas $0.0130 < 0,05$ menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Atas hasil tersebut berarti hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima dikarenakan pajak ialah faktor penting untuk investor dalam memastikan kepuasan

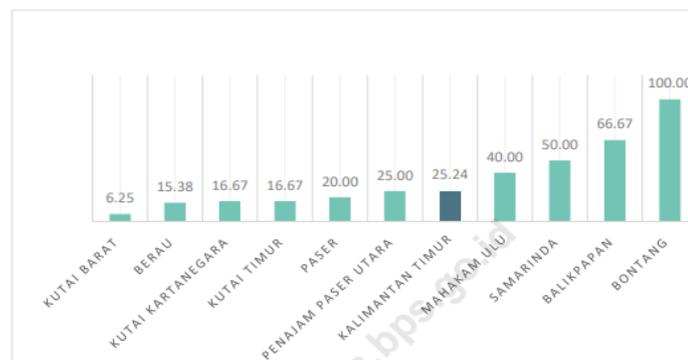
guna berinvestasi pada sesuatu Negara. Secara teori, pajak pengaruhi ketentuan berinvestasi selama pengenaan pajak itu pengaruhi besarnya biaya serta profit yang didapat investor.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Ika Novita, dkk (2020) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif investasi terhadap PAD, hal tersebut dapat dijelaskan adanya penanaman Investasi maka akan terbuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Adanya investasi juga berakibat kepada pelaksanaan proyek pembangunan, dan usaha- usaha di berbagai sektor. Dengan berjalanya aktivitas ekonomi itu secara langsung berakibat pada kenaikan penghasilan masyarakat, alhasil warga mau guna membayar pajak serta retribusi. Pembayaran pajak dan retribusi berdampak terhadap peningkatan PAD.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

Hasil regresi data panel Belanja modal memiliki t_{hitung} (1.084793) < t_{tabel} (1.67866) sementara itu nilai probabilitas 0.2854 > 0,05 menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pajak daerah. Atas hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.

Gambar 2.6. Kabupaten/Kota berdasarkan Persentase Kecamatan yang Ada Rumah Sakit di Kalimantan Timur, 2020



Sumber: BPS, Updating Podes 2020

Berdasarkan gambar tersebut, persentase kecamatan yang ada rumah sakit di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dapat dibilang rendah, pada Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki jumlah penduduk, namun dari segi persentase rumah sakit terbilang rendah. Jika dilihat dari persentase rumah sakit yang salah satunya terdapat di Kabupaten Kukar dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur belum merata dan mengakibatkan penerimaan pajaknya menurun yang dapat disebabkan karena masyarakat tidak merasakan fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Jaya dan Dwirandra (2014) menerangkan pajak yang terus menjadi meningkat diharapkan dapat bertambah alokasi belanja modal pemerintah daerah alhasil berakibat pada mutu layanan publik yang terus menjadi baik. Dengan alokasikanya berbelanja modal dari zona layanan public diharapkan pendapatan pajak yang di dapat hendak meningkat bersamaan dengan kenaikan layanan publik. Tetapi sering kali terdapatnya kenaikan peruntukan berbelanja modal tidak searah dengan pendapatan pajak daerah yang diharapkan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita Iko Novita, dkk (2020) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dalam penelitian ini mengatakan kalau salah satu perihal yang bisa mempengaruhi publik dalam membayar retribusi serta pajak merupakan bagaimana metode pemerintah daerah dalam mengatur berbelanja modal untuk membangun daerahnya. Dengan pemakaian berbelanja modal yang efektif serta efisien, sehingga fasilitas- fasilitas biasa semacam jalan raya, toilet umum, halaman hiburan, serta serupanya bisa langsung dinikmati oleh warga. Perihal itu bisa membuat warga merasakan hendak pembangunan daerah serta

mereka juga hendak rela membayar pungutan ataupun pajak selaku wujud rasa tanggung jawab mereka kepada pemerintah daerah.

Kesimpulan

PDRB tidak signifikan dan terdapat hubungan negatif terhadap pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, karena dengan meningkatnya PDRB akan memberikan pertambahan output. Semakin tingginya PDRB pada suatu daerah tidak selalu meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat akan pentingnya dalam membayar pungutan pemerintah.

Jumlah penduduk signifikan dan terdapat hubungan positif terhadap pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini diakibatkan sebab kala jumlah penduduk bertambah, sehingga permintaan akan barang public bakal terus menjadi banyak akibatnya pemerintah akan lalu memaksimalkan guna membagikan beberapa barang public itu namun dengan jasa timbal balik dari warga yang berbentuk pemungutan pajak yang bersifat memaksa.

Investasi signifikan dan terdapat hubungan positif terhadap pajak daerah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Disebabkan pajak ialah faktor penting untuk investor dalam memastikan kepuasan guna memodalkan pada sesuatu Negara. Secara teori, pajak pengaruhi ketetapan penanaman modal selama pengenaan pajak itu pengaruhi besarnya anggaran serta keuntungan yang didapat investor.

Belanja modal tidak berpengaruh dan terdapat hubungan positif Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Disebabkan dengan melonjaknya alokasi belanja modal pemerintah daerah sehingga berakibat pada mutu layanan publik yang terus menjadi bagus. Dengan alokasikanya berbelanja modal dari sektor layanan publik diharapkan pendapatan pajak yang di dapat hendak meningkat bersamaan dengan kenaikan layanan khalayak. Tetapi sering- kali terdapatnya kenaikan alokasi belanja modal tidak searah dengan pendapatan pajak wilayah yang diharapkan.

Bibliografi

- Aguswin, A., & Akromusyuhada, A. (2020). Gravity Model Dalam Place-Making Pola Interaksi Spasial Di Pulau Kalimantan. *Pelita Teknologi*, 15(2), 117–132. <https://doi.org/10.37366/Pelitatekno.V15i2.317>
- Arham, M. A. (2020). *Perekonomian Gorontalo: Perkembangan, Agenda Dan Tantangan Ke Depan*. Deepublish. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=_G0peaaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Kenaikan+Pendapatan+Pajak+Tidak+Luput+Dari+Perkembangan+Ekonomi+Nasional+Serta+Wilayah+Yang+Bertumbuh+Lumayan+Baik,+Maka+Perihal+Itu+Bisa+Pengaruh+i+Perkembangan+Pajak+Yang+Baik+Sebab+Daya+Beli+Masyarakat+Bertambah&ots=Blkuqfbhyz&sig=Uemjmmf5wyfhgo3ybxqhmzplnq&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Asmawanti, D., Elvandari, N., & Baihaqi, B. (2016). Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi Dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 35–52. <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.6.1.35-52>
- Desideria, D., Prihanto, P. H., & Hardiani, H. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Belanja Daerah, Inflasi Dan Upah Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 8(2), 121–135. <https://doi.org/10.22437/Jels.V8i2.11988>
- Fauzan, A. A. (2022). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Melalui Jumlah Penduduk= Analysis Of The Effect Of Economic Growth And Per Capita Income On Makassar's Original Regional Income Through Population*. Universitas Hasanuddin. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18912>
- Hakib, A., & Arifin, A. (N.D.).). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Jumlah Penduduk, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Maminasata. *Cesj: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 290–300. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/Cesj/article/view/582>.
- Kemenkeu. (2018). *Kajian Fiskal Regional*. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw3_2019/19_kfr

_Tw3_2019_Kalsel.Pdf.

- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 161–175. File:///C:/Users/User/Downloads/Admin,+C-1-Saniatul+Lativa.Pdf
- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–16. <https://doi.org/10.35794/jpek.32723.19.2.2018>
- Nurmuthmainnah, W. (2020). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/943/>
- Prana, R. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(1). <https://journals.synthesispublication.org/index.php/ilman/article/viewfile/33/31>
- Rukmini, B. S. (2017). Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Trenggalek. *Karya Ilmiah Dosen*, 2(2). <https://journal.stkipgtritreggalek.ac.id/index.php/kid/article/view/87>
- Wibowo, A. A. (2022). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah 5 Kabupaten Termiskin Di Kalimantan Timur Tahun 2010-2020*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39061>
- Zaini, A. (2019). *Pengembangan Sektor Unggulan Di Kalimantan Timur*. Deepublish. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=81e8dwaaqbaj&oi=fnd&pg=pr5&dq=Provinsi+Kalimantan+Timur+Merupakan+Salah+Satu+Provinsi+Di+Pulau+Kalimantan+Yang+dengan+cara+pada+umumnya+mempunyai+tingkatan+pendapatan+pajak+daerah+paling+tinggi&ots=kznkif06eg&sig=apxvom12ca79eefcu8w-gitkn1m&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false